

Penerapan Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan pada BPKAD Kabupaten Jember

Muhammad Ijal Khoiron¹, Muhammad ifan²

Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Ijalkhoiron8@gmail.com¹, ifanpamona101203@gmail.com²

Abstrak

Pengelolaan administrasi keuangan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik. Namun, pengelolaan keuangan tidak hanya membutuhkan sistem administrasi yang baik, tetapi juga membutuhkan nilai etika yang dapat menjadi dasar perilaku aparatur dalam menjalankan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip amanah dalam perspektif ekonomi Islam serta keterkaitannya dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan administrasi keuangan pada BPKAD Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research) melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip amanah memiliki peran penting dalam membangun pengelolaan keuangan daerah yang jujur, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

Keywords : *Amanah, Administrasi Keuangan, Akuntabilitas*

Abstract

Regional financial administration management is an important aspect of government implementation because it is directly related to the responsibility of managing public resources. However, financial management does not only require a proper administrative system but also requires ethical values that can serve as a foundation for the behavior of government officials in carrying out their authorities. This study aims to analyze the implementation of the principle of amanah from an Islamic economic perspective and its relationship with accountability and transparency in financial administration management at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Jember Regency. This research uses a qualitative method with a library research approach through the collection and analysis of relevant written sources. The results show that the principle of amanah plays an important role in creating regional financial management that is honest, responsible, transparent, and accountable.

Keywords: *Amanah, Financial Administration, Accountability*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keuangan daerah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pencatatan dan penggunaan anggaran, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Oleh karena itu, setiap proses administrasi keuangan harus dilakukan secara tertib, transparan, efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.¹

Dalam praktik pemerintahan daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peranan strategis dalam menjalankan fungsi pengelolaan administrasi keuangan daerah. BPKAD menjadi salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan kebijakan teknis keuangan, pengelolaan anggaran, penatausahaan keuangan, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, hingga pengelolaan aset daerah. Kompleksitas tugas tersebut menyebabkan pengelolaan administrasi keuangan membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga mempunyai nilai integritas dan tanggung jawab moral dalam menjalankan amanah publik.

Dalam perspektif Islam, konsep amanah memiliki kedudukan penting dalam setiap aktivitas manusia, termasuk dalam pengelolaan harta dan tanggung jawab publik. Amanah tidak hanya bermakna menjaga sesuatu yang dipercayakan oleh pihak lain, tetapi juga mencakup sikap jujur, bertanggung jawab, serta menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kewajiban untuk menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak menerimanya.²

Penerapan prinsip amanah dalam administrasi keuangan pemerintahan memiliki keterkaitan erat dengan konsep akuntabilitas sektor publik. Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk mampu memberikan penjelasan serta pertanggungjawaban atas setiap keputusan dan penggunaan sumber daya yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, nilai amanah dapat menjadi dasar etis yang memperkuat mekanisme administratif dalam pengelolaan keuangan daerah. Regulasi dan sistem pengawasan memang diperlukan untuk memastikan kepatuhan administratif, tetapi keberhasilan pengelolaan keuangan juga sangat dipengaruhi oleh karakter dan integritas aparatur yang menjalankannya.³

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, pengelolaan administrasi keuangan daerah tidak hanya membutuhkan sistem yang baik, tetapi juga membutuhkan nilai etika yang mampu menjadi landasan perilaku bagi aparatur dalam menjalankan tugasnya. Prinsip amanah dalam perspektif Islam memiliki keterkaitan dengan konsep akuntabilitas dalam sektor publik, karena keduanya menekankan adanya tanggung jawab atas setiap kewenangan yang diberikan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep prinsip amanah dalam perspektif ekonomi Islam yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik?

¹ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), hlm. 27.

² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa ayat 58.

³ Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), hlm. 9

2. Bagaimana hubungan prinsip amanah dengan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi keuangan daerah?
3. Bagaimana penerapan prinsip amanah dalam pengelolaan administrasi keuangan pada BPKAD Kabupaten Jember berdasarkan kajian literatur?
4. Apa saja faktor yang mendukung dan menjadi tantangan dalam penerapan nilai amanah pada pengelolaan administrasi keuangan pemerintah daerah?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis konsep amanah dalam perspektif ekonomi Islam sebagai nilai dasar dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan keuangan publik.
2. Untuk mengetahui keterkaitan prinsip amanah dengan konsep akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
3. Untuk menganalisis penerapan prinsip amanah dalam pengelolaan administrasi keuangan pada BPKAD Kabupaten Jember berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan.
4. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung serta hambatan dalam membangun pengelolaan administrasi keuangan daerah yang berlandaskan nilai amanah.

MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya mengenai penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini juga dapat memperluas pemahaman bahwa konsep amanah tidak hanya berkaitan dengan hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga memiliki relevansi dalam tata kelola organisasi dan pemerintahan.⁴

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami hubungan antara prinsip etika Islam dengan konsep akuntabilitas sektor publik. Integrasi antara nilai amanah dan prinsip administrasi keuangan modern dapat menjadi pendekatan alternatif dalam membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih berintegritas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi instansi pemerintah daerah, khususnya BPKAD Kabupaten Jember, mengenai pentingnya penguatan nilai amanah dalam pelaksanaan administrasi keuangan. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.⁵

Bagi mahasiswa, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pembelajaran dalam memahami bagaimana teori ekonomi Islam dapat dikaitkan dengan praktik administrasi pemerintahan melalui kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).

KEBARUAN PENELITIAN

Dalam perspektif ekonomi Islam, amanah merupakan nilai fundamental yang mengarahkan seseorang untuk menjalankan tanggung jawab secara jujur, profesional, dan sesuai dengan tujuan

⁴ Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 91.

⁵ Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta: ANDI, 2018), hlm. 18.

kemaslahatan. Nilai amanah juga dapat menjadi dasar etika dalam aktivitas ekonomi dan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada seseorang.⁶

Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan konsep amanah dalam perspektif ekonomi Islam dengan prinsip akuntabilitas sektor publik dalam konteks administrasi keuangan daerah. Penelitian ini tidak hanya melihat amanah sebagai nilai keagamaan, tetapi juga sebagai prinsip etika yang memiliki relevansi terhadap transparansi, tanggung jawab, dan profesionalitas aparatur pemerintah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (library research), yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui proses pengumpulan, pengkajian, dan analisis berbagai sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Studi literatur digunakan untuk memahami suatu permasalahan berdasarkan teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung melalui responden atau informan.⁷

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam melalui proses interpretasi terhadap data yang bersifat deskriptif, seperti konsep, teori, dokumen, dan hasil penelitian sebelumnya.⁸

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis bagaimana prinsip amanah dapat dipahami sebagai nilai dasar dalam pengelolaan administrasi keuangan publik.

2. Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui dokumen atau sumber yang telah tersedia sebelumnya dan digunakan untuk mendukung analisis penelitian.⁹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Literatur ilmiah, berupa jurnal nasional maupun internasional
- b. Buku akademik, yang berkaitan dengan ekonomi Islam, akuntansi sektor publik, manajemen keuangan daerah,
- c. Dokumen pendukung lainnya, seperti laporan, artikel ilmiah, dan publikasi resmi

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu proses pengumpulan informasi dengan cara menelaah berbagai dokumen dan sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi sumber, pemilihan literatur yang relevan, pencatatan informasi penting, serta pengelompokan data berdasarkan fokus penelitian.¹⁰

⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 35.

⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 3.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 104.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 274.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis). Metode ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan informasi yang terdapat dalam berbagai sumber literatur untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹¹

Tahapan analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama:

- a. reduksi data, yaitu proses memilih dan menyaring informasi dari berbagai literatur.
- b. penyajian data, yaitu menyusun hasil kajian literatur secara sistematis berdasarkan tema pembahasan.
- c. penarikan kesimpulan, yaitu proses memberikan interpretasi terhadap hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

1. Konsep Amanah dalam Perspektif Ekonomi Islam sebagai Dasar Pengelolaan Keuangan Publik

Dalam perspektif ekonomi Islam, amanah merupakan salah satu nilai utama yang menjadi dasar dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang. Amanah tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan menjaga sesuatu yang dipercayakan, tetapi juga mencakup kewajiban untuk melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan, nilai amanah memiliki hubungan yang kuat dengan tanggung jawab aparatur sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya publik.

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat karena dana yang dikelola berasal dari kepentingan publik. Oleh sebab itu, setiap aparatur yang terlibat dalam proses administrasi keuangan harus memahami bahwa kewenangan tersebut bukan hanya sebuah tugas administratif, tetapi juga sebuah tanggung jawab moral yang harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian.¹²

Prinsip amanah mendorong aparatur pemerintah untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, seperti penyalahgunaan anggaran, manipulasi laporan, maupun pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nilai ini menjadi penguat bagi sistem administrasi keuangan karena aturan dan prosedur yang ada akan berjalan lebih efektif apabila didukung oleh individu yang memiliki integritas.

2. Hubungan Prinsip Amanah dengan Akuntabilitas dan Transparansi Administrasi Keuangan Daerah

Prinsip amanah memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep akuntabilitas dalam sektor publik. Akuntabilitas menekankan bahwa setiap pihak yang diberikan kewenangan harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan maupun keputusan yang telah dilakukan. Dalam administrasi keuangan daerah, akuntabilitas menjadi unsur penting karena berkaitan dengan pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat.

Amanah memberikan dasar moral bagi pelaksanaan akuntabilitas. Jika akuntabilitas lebih menekankan pada mekanisme pertanggungjawaban melalui aturan dan laporan, maka amanah menekankan kesadaran internal seseorang untuk menjalankan tanggung jawab dengan benar.

¹¹ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, (California: Sage Publications, 2018), hlm. 24.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa ayat 58.

Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa kewenangan yang diberikan digunakan secara tepat dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan.¹³

Selain akuntabilitas, prinsip amanah juga berkaitan dengan transparansi. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana sumber daya publik direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi keuangan menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam membangun kepercayaan publik.

3. Penerapan Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan pada BPKAD Kabupaten Jember

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan kebijakan teknis keuangan, pengelolaan anggaran, penatausahaan keuangan, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, hingga pengelolaan aset daerah. Kompleksitas tugas tersebut menjadikan nilai amanah sebagai salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi.¹⁴

Berdasarkan kajian literatur, penerapan prinsip amanah dalam administrasi keuangan dapat diwujudkan melalui beberapa aspek. Pertama, aspek kejujuran dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Setiap data keuangan yang disusun harus menggambarkan kondisi sebenarnya sehingga laporan yang dihasilkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat.

Kedua, aspek tanggung jawab dalam menjalankan kewenangan. Aparatur pengelola keuangan harus memahami batas kewenangan masing-masing serta menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

Ketiga, aspek profesionalitas dalam bekerja. Nilai amanah tidak hanya berkaitan dengan moralitas, tetapi juga menuntut adanya kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan. Aparatur yang memiliki pemahaman teknis yang baik akan lebih mampu mengelola administrasi keuangan secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan.

4. Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Penerapan Nilai Amanah pada Administrasi Keuangan Daerah

Penerapan prinsip amanah dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor pendukung utama adalah adanya regulasi dan sistem pengelolaan keuangan yang jelas. Aturan yang baik dapat menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan tugas serta memberikan batasan agar pengelolaan keuangan tetap berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan.

Selain regulasi, faktor sumber daya manusia juga memiliki peranan penting. Aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan kesadaran terhadap tanggung jawab publik akan lebih mudah menerapkan nilai amanah dalam pekerjaannya. Pendidikan, pelatihan, serta pembinaan etika kerja menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas aparatur pengelola keuangan.¹⁵

Namun, dalam penerapannya masih terdapat beberapa hambatan. Salah satunya adalah adanya perbedaan tingkat pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pentingnya nilai amanah. Sebagian pihak mungkin masih melihat administrasi keuangan hanya sebagai kewajiban prosedural, bukan sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.

Hambatan lainnya dapat muncul dari kompleksitas regulasi dan perubahan sistem administrasi keuangan yang membutuhkan kemampuan adaptasi. Oleh karena itu, diperlukan

¹³ Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), hlm. 9.

¹⁴ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), hlm. 27.

¹⁵ Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 105.

penguatan budaya organisasi yang menempatkan nilai integritas, tanggung jawab, dan profesionalitas sebagai bagian utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur mengenai penerapan prinsip amanah dalam pengelolaan administrasi keuangan pada BPKAD Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa prinsip amanah memiliki peran penting sebagai dasar etika dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan keuangan publik. Amanah dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan menjaga kepercayaan, tetapi juga mencakup sikap jujur, bertanggung jawab, profesional, serta kesadaran bahwa setiap kewenangan yang diberikan harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan prinsip amanah memiliki hubungan yang erat dengan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi keuangan daerah. Akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban atas setiap penggunaan sumber daya publik, sedangkan transparansi menekankan keterbukaan dalam proses pengelolaan keuangan. Nilai amanah menjadi dasar moral yang memperkuat kedua prinsip tersebut karena mendorong aparatur untuk melaksanakan tugas bukan hanya karena adanya aturan, tetapi juga karena adanya kesadaran terhadap tanggung jawab yang diberikan.

Dalam konteks pengelolaan administrasi keuangan pada BPKAD Kabupaten Jember, penerapan prinsip amanah dapat diwujudkan melalui pelaksanaan administrasi yang tertib, pencatatan keuangan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, penyusunan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pelaksanaan tugas berdasarkan prinsip profesionalitas. Dengan adanya nilai amanah dalam diri aparatur, sistem pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dengan demikian, prinsip amanah tidak hanya menjadi nilai keagamaan dalam perspektif ekonomi Islam, tetapi juga dapat menjadi prinsip etika yang relevan dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

SARAN

1. Bagi **BPKAD Kabupaten Jember**, perlu dilakukan penguatan nilai amanah dalam lingkungan organisasi melalui peningkatan pembinaan etika kerja, pengembangan kompetensi aparatur, serta penciptaan budaya organisasi yang mengutamakan integritas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Bagi **aparatur pengelola keuangan daerah**, diharapkan dapat memahami bahwa tugas pengelolaan keuangan bukan hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.
3. Bagi **peneliti selanjutnya**, penelitian mengenai prinsip amanah dalam administrasi keuangan dapat dikembangkan melalui pendekatan empiris, seperti wawancara atau observasi langsung terhadap aparatur pemerintah daerah, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik penerapan nilai amanah dalam pengelolaan keuangan publik.

REFERENSI

- Al-Qaradawi, Y.** (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, S.** (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama Republik Indonesia.** (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Huda, N., & Heykal, M.** (2018). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Krippendorff, K.** (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. California: Sage Publications.
- Mahmudi.** (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Manan, A.** (2017). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mardiasmo.** (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo.** (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J.** (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sedarmayanti.** (2012). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono.** (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Zed, M.** (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bastian, I.** (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Sujarweni, V. W.** (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.